



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA)

Annasia Sophia Dewi, Haryanto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that affect the successes implementation of public financial disclosure through e-government. Factors tested in this research are debt (DSCR), the number of councillors, GDP per capita, citizen education level, population, and region own source revenue. Sample in this research were selected using purposive sampling method, that is e-government on 33 provinces in Indonesia. The samples are divided into two categories, provinces reporting the transparency of financial management through e-government and provinces not reporting. Statistical methods used in this study is the logistic regression at a significance level 5%. Result of this research indicate that the factor debt (DSCR), the number of councillors, and region own source revenue significantly influence the implementation of e-government. While other factors, GDP per capita, citizen education level, and population not indicate any significant effect on the implementation of e-government.

Keyword: E-Government, public financial reporting, public financial disclosure, transparency of public financial management

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang saat ini masih terhitung sebagai negara berkembang tengah berupaya untuk terus meningkatkan perekonomiannya dengan harapan keluar dari status negara berkembang dan menjadi suatu negara yang maju. Salah satu usaha meningkatkan perekonomian negara adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif, serta didalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat (Haryanto dan Sahnuddin, 2008)

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Widjaja, 2002). Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah dituntut mampu memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat. Dewasa ini, masyarakat semakin menyadari kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas akan informasi keuangan pemerintah. Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

¹Corresponding author

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dan Sahrudin, 2008)

Hal tersebut juga dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat akan pertanggungjawaban pengelolaan dana APBD oleh pemerintah yang terkadang menimbulkan dugaan-dugaan negatif yang dapat menempatkan pemerintah pada posisi yang serba salah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, penggunaan internet semakin akrab hadir ditengah masyarakat yang haus akan segala sesuatu yang bersifat praktis dan cepat. Sistem *on-line* pun makin populer, diiringi tren *e-commerce* yang terus menerus berkembang. Tren tersebut juga berpengaruh dalam bidang pemerintahan, yaitu ditandai dengan adanya *e-government* yang sudah mulai banyak disosialisasikan di berbagai negara.

E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance*.

Pemerintah Daerah merupakan institusi pemerintahan yang menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, sangat rentan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, yaitu seperti adanya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). E-government diharapkan dapat menciptakan terwujudnya *good governance* maupun *clean government* di Pemerintah Daerah di Indonesia sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan maksimal sehingga tercipta akuntabilitas publik di Pemerintah Daerah di Indonesia (Bachtiar, 2011)

Penerapan *e-government* bertujuan untuk menciptakan serta memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak. Yaitu pemerintah dengan warga negara atau *Government to Citizen (G to C)*, interaksi pemerintah dengan swasta *Government to Business (G to B)*, serta interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah *Government to Government (G to G)* maupun bentuk-bentuk interaksi lainnya, namun dalam praktiknya pasti dijumpai faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari pemecahan masalah dengan mengkaji lebih jauh lagi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-government di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*) melibatkan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori Keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. (Lupia and McCubbins, 2000)

Adanya tujuan yang berbeda antara prinsipal dan agen akan menimbulkan masalah keagenan. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan serta implementasi terhadap kebijakan perusahaan dan fungsi pengendalian yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut.

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo mengenai akuntabilitas tersebut mengandung arti bahwa terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen.

Dalam Teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat (prinsipal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa banyak terjadi *information asymmetri* antara pihak agen (pemerintah) dengan yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Dengan adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya korupsi atau penyelewengan yang rentan dilakukan oleh pemerintah (agen). Sebagai konsekuensinya, harus terdapat akuntabilitas atas kinerja pemerintah (agen) sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *informatin asymmetry*. (Mardiasmo, 2002)

Oleh karena itu, mengingat pentingnya akuntabilitas terhadap publik tersebut, perlu dilakukan revitalisasi *e-government* yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah demi kepentingan kesejahteraan masyarakat luas.

Pengaruh Utang Pemerintah Daerah terhadap implementasi e-government

Dalam konteks pemerintahan, utang/kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran (PSAP 09)

Sejalan dengan teori keagenan, dimana pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal yang dituntut untuk memenuhi keinginan prinsipal, pemerintah Daerah selaku pemilik hutang memberikan insentif yang lebih dominan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat. (Gore et al, 2004). Hal ini disebabkan karena pemberi hutang (kreditur) akan menuntut adanya transparansi untuk akuntabilitas melalui implementasi *e-Government*.

Didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luder(1992) dan Fisheretal.(2005), mereka menemukan adanya hubungan positif antar utang pemerintah dan pengungkapan informasi keuangan publik. Ketika terjadi masalah mengenai utang maka pengungkapan informasi keuangan kepada publik menjadi lebih penting dengan menerbitkan laporan yang mencerminkan situasi keuangan dari pemerintah. Dengan demikian, keberadaan utang bisa mendukung pengungkapan informasi keuangan publik (Wilson dan Howard, 1985). Atas dasar alasan tersebut, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut :

H1 : Utang pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *E-Government*

.Pengaruh Kompetisi Politik terhadap implementasi e-government

Dalam suatu literatur ilmu politik diasumsikan bahwa persaingan partai yang kuat memberikan insentif bagi pemerintah dan mempengaruhi birokrasi (Dye dan Robey, 1980). Studi sebelumnya telah melihat pengaruh dari kompetisi politik terhadap akuntansi sektor publik. (Zimmerman, 1977; Ingram, 1984; Baber dan Sen, 1984; Evans dan Patton, 1987) . Beberapa studi menemukan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara kompetisi politik dan pengungkapan informasi keuangan publik. Sejalan dengan teori Agensi dimana masyarakat sebagai prinsipal dan para anggota dewan sebagai agen, para politikus mengharapkan mendapatkan suara pemilih dari masyarakat lebih banyak, sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemilih. Lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota dewan, diharapkan dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Sehingga konsekuensinya, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab dalam mengungkapkan informasi keuangan terhadap publik. Dengan demikian, variabel ini akan diuji. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H2: Jumlah Anggota Dewan berpengaruh positif pada kemungkinan implementasi e-Government

Pengaruh pendapatan regional perkapita terhadap implementasi e-government

Pendapatan regional perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah, semakin besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur wilayah tersebut. Secara konsepsional PDRB perkapita diperoleh dengan membagi total pendapatan regional dengan jumlah penduduk dalam regional tersebut pada tahun yang sama. (Sumber : www.bi.go.id) Menurut Style dan Tennyson, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pengawasan politik yang lebih tinggi dan cenderung lebih banyak permintaan akan akuntabilitas oleh masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana masyarakat (prinsipal) akan menuntut pemerintah (agen) untuk memenuhi keinginan mereka. Atas dasar hal tersebut, maka variabel ini akan diuji apakah di Indonesia membuktikan hasil yang signifikan juga, sehingga dikembangkan hipotesis :

H3: Pendapatan Regional perkapita berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *E-Government*

Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap implementasi e-government

Evans dan Yen (2005) mengamati bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi informasi, sehingga akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan implementasi *E-Government*. Apabila suatu negara memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, maka masyarakat tersebut cenderung tidak terbiasa dalam mengakses internet maupun teknologi informasi lainnya. Dengan kemampuan akses teknologi yang terbatas, tentunya membuat masyarakat tidak menuntut adanya pengungkapan informasi keuangan secara *online*. Beberapa studi sebelumnya telah mengamati bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap pengungkapan informasi (Chaudhuri et al., 2005). Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap keberhasilan *e-Government* di Indonesia dengan menggunakan angka perguruan tinggi tiap provinsi karena, perguruan tinggi merupakan tingkatan paling tinggi dalam pendidikan dengan umur mahasiswa/mahasiswi yang tentunya sudah terbelah matang dan tentunya kritis terhadap segala fenomena yang terjadi disekitar, khususnya mengenai akuntabilitas pemerintahan di wilayahnya. Sejalan dengan Teori Agensi, mahasiswa selaku masyarakat (prinsipal) dapat menuntut pemerintah (agen) untuk melaporkan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. Selain itu mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan akan teknologi informasi paling tinggi dibanding jenjang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-Government*

Pengaruh Populasi Masyarakat terhadap implementasi e-government

Beberapa studi telah menemukan bahwa organisasi yang lebih besar cenderung mengadopsi teknologi baru dan lebih sering melakukan inovasi dibandingkan dengan organisasi yang lebih kecil. Dengan demikian, Moon dan Norris (2005) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk mengadopsi teknologi *E-Government* dibanding pemerintah daerah yang lebih kecil, karena pemerintah daerah yang lebih besar cenderung mendapatkan tuntutan yang lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik serta meningkatkan pelayanan informasi. Pemerintah daerah yang lebih besar juga memiliki sumber daya anggaran lebih banyak dan departemen pengelola teknologi informasi yang lebih baik. Evans dan Patton (1987) menemukan bahwa populasi masyarakat merupakan variabel yang signifikan dalam pengungkapan informasi keuangan terhadap publik. Semakin besar populasi, maka akan semakin besar tekanan yang ditujukan terhadap pemerintah akan perwujudan akuntabilitas terhadap publik. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana masyarakat sebagai prinsipal akan menuntut pemerintah sebagai agen untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal (masyarakat). Atas alasan tersebut, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

H5 : Besar populasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-Government

Pengaruh Tekanan Fiskal terhadap implementasi e-government

Ingram (1984) menemukan bahwa semakin besar tekanan fiskal, maka pengungkapan informasi keuangan sektor publik semakin dianggap penting. Dalam penelitian Perez et al. (2008), tekanan fiskal yang dimaksud adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak maupun bukan pajak serta penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, agar dapat disesuaikan dengan data yang tersedia di Indonesia. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin besar pertanggungjawaban pemerintah, baik secara internal maupun eksternal. Internal kepada pemerintah pusat dan DPRD. Eksternal kepada masyarakat, BPK, serta stakeholder lain yang berhak atas informasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana pemerintah sebagai agen yang memiliki akses langsung terhadap informasi, harus melaporkan informasi tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat (prinsipal). Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi E-Government

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi *e-government* pada pemerintah daerah tingkat provinsi. Dalam penelitian ini digunakan *E-Government Yes or No* yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu Konten Informasi yang disajikan, Karakteristik Website, dan Desain dan Akses. Dari 3 kategori tersebut didalamnya terdapat ukuran-ukuran yang akan diberi nilai 1 apabila ada pada *e-government* suatu pemerintah provinsi, dan 0 apabila tidak ada. Untuk menilai suatu provinsi telah mengimplementasikan *e-government* atau belum, setidaknya-tidaknya suatu provinsi harus memenuhi ketiga kategori tersebut. Untuk itu, dibuat kriteria sebagai berikut :

1. Kategori “Desain dan Akses” terpenuhi paling sedikit 50%
2. Kategori “Konten Informasi yang disajikan” , terpenuhi paling sedikit 25%
3. Kategori “Karakteristik Website” terpenuhi paling sedikit 10%

Pemerintah provinsi yang memenuhi 3 kategori tersebut, dianggap telah mengimplementasikan *e-government*, sedangkan pemerintah provinsi yang tidak memenuhi ketiga kategori tersebut dianggap belum mengimplementasikan *e-government*.

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ada 6, yaitu Utang Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan DSCR (Debt Service Coverage Ratio), Kompetisi Politik yang diproksikan dengan Jumlah Anggota Dewan tiap pemerintah provinsi, Pendapatan Regional Perkapita yang diproksikan dengan PDRB perkapita, Tingkat Pendidikan Masyarakat yang diproksikan dengan Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 19-24, Populasi masyarakat yaitu besarnya jumlah penduduk pada suatu provinsi, dan Tekanan Fiskal yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah tingkat provinsi yang memiliki *e-government* yang diharapkan memuat laporan keuangan.
2. *E-government* tidak dalam masa perbaikan atau nonaktif.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *logistic regression*, dikarenakan variabel dependennya merupakan variabel kualitatif, yaitu apakah pemerintah provinsi telah menerapkan e-government atau belum pada 33 provinsi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi pelaporan keuangan daerah melalui *e-government* pada 33 provinsi di Indonesia. Variabel dependen penelitian ini yaitu ketersediaan pelaporan keuangan secara *online* dalam *e-government* pada 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan Variabel independen yang digunakan ada 6, yaitu *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Jumlah Anggota Dewan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 19 – 24 tahun, Populasi Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling method*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain pemerintah provinsi memiliki *e-government* yang diharapkan memuat pelaporan keuangan. *E-Government* tidak dalam masa perbaikan, tidak terdapat *error*, atau nonaktif.

Data variabel dependen diperoleh melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan pelaporan keuangan secara *online* dalam *e-government* atau situs *web* pemerintah daerah di 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan data variabel independen yang digunakan untuk analisis penelitian ini didapatkan melalui berbagai *website* pemerintah, seperti Kementrian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan *website* resmi pemerintah tiap provinsi. Adapun provinsi melaporkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui *e-government* dan yang tidak, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Provinsi yang melaporkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui *e-government* dan yang tidak

Provinsi yang melaporkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui <i>e-government</i>	Provinsi yang tidak melaporkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui <i>e-government</i>
Aceh	Jambi
Sumatera Utara	Kep. Bangka Belitung
Sumatera Barat	Kep. Riau
Riau	Jawa Timur
Sumatera Selatan	Yogyakarta
Bengkulu	Nusa Tenggara Timur
Lampung	Kalimantan Tengah
DKI Jakarta	Kalimantan Selatan
Jawa Barat	Sulawesi Utara
Jawa Tengah	Sulawesi Tengah
Banten	Sulawesi Tenggara
Bali	Gorontalo
Nusa Tenggara Barat	Maluku
Kalimantan Barat	Maluku Utara
Kalimantan Timur	Papua
Sulawesi Selatan	Papua Barat
Sulawesi Barat	

Statistik Deskriptif

Berikut ini statistik deskriptif data penelitian :

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Provinsi yang tidak Menerapkan E-Government (0)

Provinsi yang tidak menerapkan E-Government (0)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
DSCR	16	3	100,00	9,28063	25,70635
DPRD	16	35	100	50,31250	14,36532
PDRB	16	6056973,74	884143574,81	94587827,67	211770726,76
APS	16	8,71	41,73	16,4025	7,94813
POPULASI	16	1038087	37476757	4790631,063	8806580,833
PAD	16	80678449312,00	7615042879117,00	889311835820,62	1821339981900,70

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Provinsi yang Menerapkan E-Government (1)

Provinsi yang menerapkan E-Government (1)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
DSCR	17	0,22	100,00	24,40118	43,23453
DPRD	17	45	100	69,58824	19,32310
PDRB	17	12895358,24	982540043,96	265152284,53	286965918,47
APS	17	10,01	27,48	15,80529	4,53947
POPULASI	17	607787	32382657	6866328,471	7340409,187
PAD	17	110075878973,00	16022580846665,00	2674460504125,15	3771662113262,26

Sumber: data diolah 2013

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 4.6
Hasil Uji Wald

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step							
1 ^a	DSCR	0,37	0,018	4,212	1	0,04	1,037
	DPRD	0,564	0,264	4,563	1	0,033	1,757
	PDRB	0,00001	0	3,682	1	0,055	1
	APS	-0,19	0,077	0,059	1	0,808	0,982
	POPULASI	0,00001	0	3,275	1	0,07	1
	PAD	0,00001	0	4,33	1	0,037	1
	Constant	-26,569	11,99	4,91	1	0,027	0

Ringkasan mengenai pengujian hipotesis secara keseluruhan disajikan pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Keterangan
Ha1 : Utang (DSCR) berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government	Diterima
Ha2 : Jumlah Anggota Dewan (DPRD) berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government	Diterima
Ha3 : Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita berpengaruh terhadap kemungkinan implementasi e-government	Ditolak
Ha4 : Tingkat pendidikan masyarakat (APS) berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government	Ditolak
Ha5 :Populasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government	Ditolak
Ha6 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government	Diterima

Sumber: Data diolah 2013

1. Utang (DSCR) berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata utang (DSCR) dari provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) sebagian besar memiliki kekuatan 9,28% untuk berhutang kepada pemerintah pusat. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yang sebagian besar memiliki kekuatan 24,40%. Nilai minimum utang (DSCR) dari provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) memiliki kekuatan paling sedikit 0,09% untuk berhutang kepada pemerintah pusat. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yang memiliki kekuatan paling sedikit 0,22% untuk berhutang kepada pemerintah pusat. Nilai maksimum utang (DSCR) dari provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) dan yang menerapkan *E-Government* (kode 1) memiliki kekuatan paling maksimal 100% untuk berhutang kepada pemerintah pusat. Standar deviasi utang (DSCR) dari provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) sebesar 25,70635 lebih kecil daripada standar deviasi utang (DSCR) dari provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) sebesar 43,23453 . Hal ini menunjukkan bahwa utang (DSCR) dari 17 provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) lebih bervariasi dibandingkan dengan 16 provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0).

Hasil estimasi regresi antara variabel utang (DSCR) terhadap variabel implementasi *e-government* menunjukkan nilai estimasi sebesar 0,37 yang memiliki arah positif, hal ini sesuai dengan arah prediksi yang berarah positif. Artinya, semakin tinggi utang (DSCR) pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik, karena semakin tinggi utang (DSCR) pemerintah daerah maka akan semakin akurat dalam ketersediaan pelaporan keuangan secara *online* dalam *e-government* tiap pemerintah daerah provinsi untuk mengkalkulasi utang daerahnya. Dalam uji signifikansi *wald* terhadap hipotesis pertama diperoleh nilai *wald* hitung sebesar 4,212 dan nilai signifikan sebesar 0,04 . Apabila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Itu berarti, hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa faktor utang (DSCR) berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik di tiap pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia.

Kemudian, secara teoritis dinyatakan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat rasio kemampuan berhutang yang besar diasumsikan mempublikasikan laporan keuangan melalui *e-government* atau *website* pemerintah daerah. Sebagai contoh, provinsi Bengkulu. Bengkulu tidak memiliki pembiayaan kepada pemerintah pusat sehingga bisa diasumsikan untuk tahun-tahun berikutnya provinsi Bengkulu memiliki kekuatan 100% untuk berhutang kepada pemerintah pusat. Hal ini terkait dengan PP no.23 tahun 2003, nilai DSCR paling sedikit 2,5. Sehingga, apabila suatu daerah memiliki DSCR lebih dari 2,5 maka daerah tersebut boleh melakukan pinjaman jangka

panjang. Didukung penelitian terdahulu, yaitu oleh Gore (2004), insentif yang diberikan pemilik hutang untuk mempublikasikan pelaporan keuangan lebih dominan dibanding tekanan regulasi. Hal ini disebabkan karena pemberi utang akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan cara yang paling aplikatif, yaitu *e-government*.

Sehingga, sesuai dengan yang telah dikemukakan, salah satu tujuan pemerintah melakukan *e-government* yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*, diantaranya masyarakat, kalangan bisnis, dan industri. Sejalan dengan teori keagenan, dimana pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal yang dituntut untuk memenuhi keinginan prinsipal. Terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi pemerintah demi tercapainya *Good Governance*.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ha1 yang menyatakan Utang (DSCR) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-government* **diterima** secara statistik oleh hasil penelitian empiris.

2. Pengaruh Politik (Jumlah Anggota Dewan) berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-government*

Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata jumlah anggota DPRD dari provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) sebesar 50,31250 atau sekitar 50 orang. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD dari provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sekitar 70 orang. Jumlah anggota DPRD yang paling sedikit dari provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) adalah 35 orang. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD dari provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu 45 orang. Sedangkan jumlah anggota DPRD yang paling banyak diantara keduanya sama yaitu 100 orang. Rata-rata variasi dari jumlah anggota DPRD pada provinsi yang belum menerapkan *E-Government* terhadap nilai rata-rata adalah sekitar 15 orang yang mana lebih kecil dibandingkan dengan anggota DPRD dari provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sekitar 20. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran jumlah anggota DPRD untuk setiap provinsi kurang merata.

Hasil estimasi regresi antara Jumlah anggota dewan terhadap variabel implementasi *e-government* menunjukkan nilai estimasi sebesar 0,564 yang memiliki arah positif, hal ini sesuai dengan arah prediksi yang berarah positif. Artinya, semakin banyak jumlah anggota dewan atau pada DPRD tingkat provinsi, maka semakin tinggi pula implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik, karena lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien efektif, transparan dan akuntabel. Sehingga, semakin besar jumlah anggota dewan, maka pengawasan keuangan akan lebih ketat, serta dorongan untuk melaporkan keuangan kepada publik juga akan lebih besar pula. Dalam uji signifikansi *wald* terhadap hipotesis kedua diperoleh nilai *wald* hitung sebesar 4,563 dan nilai signifikan sebesar 0,033. Apabila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa faktor politik, yaitu Jumlah anggota dewan berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik di tiap pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia.

Dalam suatu literatur ilmu politik diasumsikan bahwa persaingan partai yang kuat memberikan insentif bagi pemerintah dan mempengaruhi birokrasi (Dye dan Robey, 1980). Penelitian terdahulu telah melihat pengaruh dari kompetisi politik terhadap akuntansi sektor publik. (Zimmerman, 1977; Ingram, 1984; Baber dan Sen, 1984; Evans dan Patton, 1987). Beberapa penelitian menemukan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara kompetisi politik dan pengungkapan informasi keuangan publik. Sejalan dengan teori Agensi dimana masyarakat sebagai prinsipal dan para anggota dewan sebagai agen, para politikus mengharapkan mendapatkan suara pemilih dari masyarakat lebih banyak, sehingga mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemilih. Sehingga semakin banyak jumlah wakil rakyat terpilih yang ada di tubuh DPRD tingkat provinsi, maka pengawasan keuangan pemerintah daerah akan semakin ketat, dorongan untuk melakukan pelaporan keuangan demi akuntabilitas terhadap rakyat pun semakin besar sebagai bentuk tanggung jawab serta ketidakinginan mengecewakan rakyat yang telah memilih.

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 yang menyatakan jumlah anggota dewan berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-government* **diterima** secara statistik oleh hasil penelitian empiris.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government

Hasil analisis deskriptif menunjukkan sebagian besar dari provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) memiliki PDRB sebesar 94587827,67. Dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 265152284,53. Nilai minimum PDRB untuk provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) adalah 6056973,74. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 12895358,24. Nilai maksimum PDRB untuk provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) adalah sebesar 884143574,81. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 982540043,96. Standar deviasi PDRB untuk provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) adalah 211770726,76 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 286965918,47. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman PDRB untuk provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) lebih besar dibandingkan dengan provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0).

Hasil estimasi regresi antara variabel PDRB terhadap variabel implementasi *e-government* menunjukkan nilai estimasi sebesar 0,00001 yang memiliki arah positif, sesuai dengan arah prediksi yang berarah positif. Artinya, semakin tinggi PDRB perkapita, maka semakin tinggi pula implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik. Dalam uji signifikansi *wald* terhadap hipotesis ketiga diperoleh nilai *wald* hitung sebesar 3,682 dan nilai signifikan sebesar 0,055. Apabila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil statistik menunjukkan bahwa PDRB perkapita tidak berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik di tiap pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia.

Menurut penelitian terdahulu oleh GASB (1999) dan GFOA (2003) dalam Styles dan Tenneson (2007) menyatakan bahwa semakin besar pendapatan perkapita suatu daerah, maka lebih tinggi pula permintaan akuntabilitas laporan keuangannya serta tingkat pengawasan politis yang lebih tinggi oleh suatu kelompok masyarakat dan lebih banyak permintaan informasi yang dapat menyediakan ukuran-ukuran kinerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB ADHK. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi total PDRB tersebut dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. (sumber : www.bi.go.id) Namun, pendapatan masyarakat yang tinggi belum tentu merefleksikan tingkat kepedulian masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Mereka cenderung lebih peduli dan sibuk mengurus keuangan pribadi mereka, dan menganggap masalah keuangan daerah bukan ranah yang perlu mereka jajah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan pendapatan yang tinggi belum tentu memiliki kepedulian dan kesadaran yang besar pula akan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasilnya sependapat dengan Robbins dan Austin (1986) dimana besarnya pendapatan perkapita tidak berpengaruh positif terhadap tingginya permintaan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Seperti pada provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan PDRB tinggi, namun belum melakukan pelaporan secara *online*.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ha3 yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-government* ditolak secara statistik oleh hasil penelitian empiris.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tidak berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-government*

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata APS provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) adalah sebesar 16,4025. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan rata-rata APS provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 15,80529. Hal ini dikarenakan DI Yogyakarta yang merupakan kota pelajar masuk ke dalam kategori provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0). Nilai APS minimum provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) sebesar 8,71 dimana angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai APS minimum untuk provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 10,01. Provinsi dengan APS terbesar adalah Yogyakarta sebesar 41,73 yang masuk kategori provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0). Standar deviasi APS provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) adalah sebesar 7,94813. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi APS provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 4,53947. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman APS provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) lebih besar daripada APS provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1). Hasil estimasi regresi antara variabel tingkat pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 19-24 terhadap variabel implementasi *e-government* menunjukkan nilai estimasi sebesar 0,019 yang memiliki arah negatif, hal ini tidak sesuai dengan arah prediksi yang berarah positif. Artinya, semakin tinggi APS, maka semakin rendah implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik. Dalam uji signifikansi *wald* terhadap hipotesis ketiga diperoleh nilai *wald* hitung sebesar 0,059 dan nilai signifikan sebesar 0,808. Apabila dibandingkan dengan taraf signiikan 0,05 maka nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil statistik menunjukkan bahwa APS tidak berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik di tiap pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia.

Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 19-24 tahun merupakan perbandingan antara murid yang berumur 19-24, dengan penduduk usia 19-24 tahun. Kelompok umur 19-24 tahun merupakan kelompok usia pada saat seseorang berada pada tingkat pendidikan tinggi, yaitu pada perguruan tinggi. Mahasiswa atau Mahasiswi adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Mereka dianggap sebagai golongan terdidik karena mampu mengenyam pendidikan tinggi yang membutuhkan curahan pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Predikat tersebut disinonimkan bahwa mahasiswa memiliki basis keilmuan yang kuat. Oleh karena itu, mahasiswa disebut sebagai agen pembawa perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat dan bangsa. Tugas mahasiswa yaitu bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang mereka miliki selama menjalani pendidikan. Untuk membawa perubahan diperlukan kesadaran publik yang tinggi. Kesadaran publik muncul dibentuk melalui institusi, media, budaya, dan karakter sosial masyarakat.

Namun, dewasa ini kesadaran publik dan kekritisian mahasiswa terhadap hak masyarakat akan informasi publik sangat rendah. Tingginya tingkat pendidikan mereka sebagai mahasiswa tidak selalu diiringi dengan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik. Apalagi sebagian mahasiswa memiliki prinsip fokus belajar yang hanya terpaku pada perannya untuk belajar dan belajar, sehingga ketajaman sosial mereka dinilai masih lemah. Ketajaman sosial yang lemah menyebabkan mereka acuh tak acuh terhadap hak masyarakat akan akuntabilitas publik. Selain itu, rendahnya tingkat penduduk yang mengenyam pendidikan menjadi salah satu pemicu ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya kesadaran akan informasi guna meningkatkan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha4 yang menyatakan tingkat pendidikan (APS) berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-government* ditolak secara statistik.

5. Populasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) adalah sebesar 4790631,063 orang. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan rata-rata jumlah penduduk provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) sebesar 6866328657,00. Jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di provinsi Sulawesi Barat sebesar 607787 orang yang merupakan provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1). Sedangkan jumlah penduduk terbesar terdapat di provinsi Jawa Timur sebesar 37476757 orang yang merupakan provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0). Standar deviasi jumlah penduduk provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) sebesar 8806580,833 sedangkan standar deviasi jumlah penduduk provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) adalah sebesar 7340409,19. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran jumlah penduduk di setiap provinsi belum merata.

Hasil estimasi regresi antara variabel populasi masyarakat terhadap variabel implementasi *e-government* menunjukkan nilai estimasi sebesar 0,00001 yang memiliki arah positif, hal ini sesuai dengan arah prediksi yang berarah positif. Artinya, semakin tinggi populasi masyarakat, maka semakin tinggi pula implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik. Dalam uji signifikansi *wald* terhadap hipotesis ketiga diperoleh nilai *wald* hitung sebesar 3,275 dan nilai signifikan sebesar 0,70. Apabila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil statistik menunjukkan bahwa populasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik di tiap pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa organisasi yang lebih besar cenderung mengadopsi teknologi baru dan lebih sering melakukan inovasi dibanding organisasi yang lebih kecil. Moon dan Norris(2005) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk mengadopsi teknologi *E-Government* dibanding pemerintah daerah yang lebih kecil, karena pemerintah daerah yang lebih besar cenderung mendapatkan tuntutan yang lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik serta meningkatkan pelayanan informasi. Namun peneliti lain, Robbins dan Austin (1986) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara faktor populasi dan pelaporan keuangan. Ingram (1984) dan Ingram dan de Jong (1987) pun tidak menemukan hubungan statistik antara kedua variabel tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak selalu populasi yang lebih besar berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan. Karakteristik penduduk merupakan tingkat penentu tekanan dari masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan membutuhkan dukungan publik, dan dukungan publik tidak akan muncul tanpa adanya kesadaran publik.

Terkait dengan jumlah populasi masyarakat, sebesar-besarnya jumlah populasi di suatu pemerintah daerah, apabila mereka tidak memiliki kesadaran publik maka mereka tidak akan berkontribusi untuk menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami manfaat yang didapat dari teknologi informasi sebagai alat pelaporan akuntansi sektor publik. Sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak warga negara agar dapat mengakses informasi penyelenggaraan pemerintah dengan adanya rasa kepemilikan bersama terhadap dana publik, alokasi anggaran, rencana kerja, serta kinerja pemerintah daerah. Selain itu, besarnya jumlah populasi masyarakat di suatu wilayah belum tentu menjamin bahwa mereka masyarakat yang memiliki daya pikir kritis yang besar pula untuk menuntut adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah.

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Ha5 yang menyatakan bahwa populasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-government* ditolak secara statistik oleh hasil penelitian empiris.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi e-government

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata PAD provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) sebesar 889311835820,62 jauh lebih kecil dibandingkan

dengan provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 2674460504125,15. Provinsi yang memiliki PAD terkecil adalah Maluku Utara sebesar 80678449312,00 yang merupakan yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0). Sedangkan provinsi yang memiliki PAD terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 16022580846665,00. Standar deviasi PAD provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0) sebesar 1821339981900,70 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi PAD provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) yaitu sebesar 3771662113262,26. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman PAD provinsi yang menerapkan *E-Government* (kode 1) lebih besar dibandingkan dengan PAD provinsi yang belum menerapkan *E-Government* (kode 0).

Hasil estimasi regresi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel implementasi *e-government* menunjukkan nilai estimasi sebesar 0,00001 yang memiliki arah positif, hal ini sesuai dengan arah prediksi yang berarah positif. Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) , maka semakin tinggi pula implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik. Dalam uji signifikansi *wald* terhadap hipotesis ketiga diperoleh nilai *wald* hitung sebesar 4,330 dan nilai signifikan sebesar 0,037. Apabila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hasil statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik di tiap pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi pembiayaan di masa yang akan datang. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah, maka semakin besar pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola keuangan, baik kepada internal maupun eksternal. Internal kepada pemerintah pusat dan DPRD, sedangkan eksternal terhadap BPK dan tentunya masyarakat sebagai stakeholder yang berhak atas informasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana pemerintah sebagai agen yang memiliki akses langsung terhadap informasi, harus melaporkan informasi tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat (prinsipal). Apabila didalam perusahaan berita positif selalu disampaikan untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik para investor, hal tersebut pula lah yang pemerintah daerah lakukan terhadap PAD. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar atas sukses atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa H_0 yang menyatakan bahwa populasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kemungkinan implementasi *e-government* diterima secara statistik.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Utang (DSCR), Jumlah Anggota Dewan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan berpengaruh positif terhadap implementasi *e-government*. Sedangkan PDRB perkapita, Tingkat Pendidikan Masyarakat (APS), DAN Populasi Masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi *e-government*.

Dalam penyusunan penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan yakni *pertama*, kriteria yang dibangun untuk menilai suatu provinsi telah mengimplementasikan *e-government* atau belum yang diukur dengan *e-government yes or no*, dibuat dengan presentase yang berbeda-beda dan yang penting telah memenuhi ketiga kategori tersebut. Hal ini dikarenakan masih rendahnya implementasi *e-govenment* di pemerintah provinsi di Indonesia, sehingga apabila kriteria presentase pemenuhan tiap kategori disama ratakan, maka pemerintah provinsi yang lolos atau dianggap telah mengimplementasikan sangat sedikit. Misalnya, dengan kriteria pemenuhan 50% untuk semua kategori, maka pemerintah provinsi yang lolos atau dianggap telah mengimplementasikan *e-government* hanya 1 pemerintah provinsi. Dengan demikian, dibuat presentase pemenuhan yang berbeda-beda untuk tiap kategori. *Kedua*, Sensus penduduk Indonesia yang dilakukan 10 tahun sekali, yaitu terakhir dilakukan pada tahun 2010 menyebabkan keterbatasan data untuk jumlah populasi masyarakat pada tahun 2011. Sehingga walaupun data untuk variabel lain adalah data pada periode 2011, untuk populasi masyarakat ini menggunakan data populasi penduduk tahun 2010. *Ketiga*, Keterbatasan data, yaitu tidak adanya data resmi tingkat pengguna internet, khususnya untuk tiap provinsi di Indonesia. Padahal menurut penelitian

terdahulu oleh Perez, Bolivar dan Hernandez yang dilakukan di Spanyol, variabel tingkat pengguna internet tersebut memiliki asosiasi positif terhadap pelaporan keuangan daerah secara *online*.

Saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah Bagi pemerintah daerah tingkat provinsi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa utang pemerintah daerah, jumlah anggota dewan, dan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik. Dengan demikian, diharapkan pemerintah provinsi tetap memperhatikan dan meningkatkan faktor-faktor tersebut agar implementasi *e-government* sebagai sarana akuntabilitas publik dapat lebih maksimal. Serta bagi pemerintah provinsi yang belum melaporkan pengelolaan keuangan daerahnya melalui *e-government* diharapkan juga memperhatikan faktor-faktor tersebut, misalnya dengan menambah jumlah anggota dewan tingkat provinsi agar pengawasan terhadap keuangan daerah oleh legislatif makin ketat. Para peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada bidang yang sama sebaiknya menggunakan variabel-variabel lain yang kiranya memiliki pengaruh positif terhadap implementasi *e-government* di setiap provinsi atau mencoba melakukan penelitian mengenai implementasi *e-government* namun bukan pada pemerintah daerah tingkat provinsi, melainkan pada pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia.

REFERENSI

- Baber, W.R. and Sen, P.K. 1984. "The Role of Generally Accepted Reporting Method in the Public Sector: An Empirical Test". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.3 No.2, pp. 91-106
- Bachtiar, Adam. 2011. "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglag, <http://elib.unikom.ac.id>, diakses 5 Januari 2013
- Chaudhuri, A., Flamm, K.S and Horrigan, J. 2005. "An Analysis of the Determinants of Internet Access." *Telecommunications Policy*, Vol.29 , pp.731-755
- Dye, T. And Robey, J. 1980. "Versus Economics: Development of the Literature on Policy", in Dye, T. and Gray, V. (Eds), *The Determinants of Public Policy*, D.C Heath, Lexington, MA, pp.3-17
- Evans, D. and Yen, C.D. 2005. "E-Government : An Analysis of Implementation : Framework for Understanding Cultural and Social Impact", *Government Information Quarterly*, Vol. 22 No. 3, pp.354-373
- Evans, J.H. and Patton, J.M. 1987. "Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting". *Journal of Accounting Reserach*, Vol.25, pp.130-158.
- Fama, Eugene F. And M.C Jensen (1983), "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economic*. Vol.26, pp.301-325
- Fisher, R., Laswad, F. And Oyelere, P. 2005. "Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities, *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.24 No. 2, pp. 101-121.
- Gore, A., Sachs, K. And Trzcinka, C. 2004. "Financial Disclosure and bond insurance", *The Journal of Law and Economics*, Vol. 47 No. 1, pp.275-306
- Haryanto dan Sahnuddin. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Ingram, R.W. and de Jong, D.V. 1987. "The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practices". *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 6 No. 4, pp.245-270



- Luder, K, 1992, A Contingency Model of governmental Accounting Innovations in The Political Administrative Environment”, Research in Governmental and Nonprofit Accounting (RIGNA), Vol.7 , pp. 99-127
- Lupia, Arthur and Mathew Cubbins. 2000. “Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed.” European Journal of Political Research No. 37 : h. 291-307
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Moon, M.J and Norris, D.F. 2005. “Does Managerial Orientation Matter? The Adoption of Reinventing Government and E-Government at the Municipal Level”. Information System Journal, Vol. 15 No.1, pp.43-60
- Perez, C.C., Bolivar, M. P. R., and Hernandez, A. M. L. 2008. “e-Government process and incentives for online public financial information. Diakses tanggal 17 Desember 2012, dari www.emeraldinsight.com/1468-4527.htm
- Produk Domestik Regional Bruto. www.bi.go.id . Diakses tanggal 15 Februari 2013.
- Robbins, W. And Austin, K. 1986. “Determinants of disclosure quality in Municipal Financial Reports : Some Additiona, Evidence”, Journal of Accounting Research. Vol. 24 No. 2, pp.412-421
- Styles, Alan K. And Tennyson, Mack, 2007. “The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet”. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Spring.
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Wilson, E. and Howard, T. 1985. “Informartion for Municipal Bond Investment Decisions : Synthesis of Prior Research, an Extension and policy implications”, Research in Governmental and Nonprofit Accounting (RIGNA), vol.1 pp. 213-263
- Zimmerman, J.L. 1977. “The Municipal Accounting Maze : An Analysis of Political Incentives”, Journal of Accounting Research, Vol.15, pp. 107-144